KONTEKSTUALISASI TEOLOGI KEADILAN DALAM HUKUM *QISHASH* DAN POLIGAMI

Oleh: Ismail Keri[1]; Misbahuddin[2]; Wahid Haddade[3]

[1]Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

[23]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: Ismailkeri48@gmail.com

Abstrack

This article discusses the theology of Islamic legal justice, in Qishash and Polygamy. Justice theology is a discourse that discusses justice based on religious reasoning. This article is a literature review with a normative theological approach. In the discussion it was stated that: Justice is absolute and morally binding, therefore believers are warned not to let hatred against someone cause them to violate the boundaries of justice, or make themselves deviate from the ideal of justice, because justice is very close to piety. and truth. The terminology of justice in Islamic law is interpreted as: fair in the sense of being similar or impartial and impartial, justice also means conformity and balance. In addition, justice also means paying attention to individual rights and giving these rights to their owners. (puts everything in its place).

Keyword: Contextualization; Polygamy; Qishash; Justice Theory.

Abstrak

Artikel ini membahas kajian teologi keadilan hukum Islam, dalam syariat *Qishash* dan Poligami. Teologi keadilan adalah wacana yang memperbincangkan tentang keadilan berdasarkan nalar agama. Artikel ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan teologis normatif. Dalam pembahasan disebutkan bahwa: Keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat, oleh karena itu orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan, atau membuat diri mereka menyeleweng dari ideal keadilan, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran. Terminologi keadilan dalam hukum Islam dimaknai dengan: adil dalam arti ‘sama’ atau tidak memihak serta tidak berat sebelah, keadilan juga bermakna kesesuaian dan keseimbangan. Selain itu, keadilan juga bermakna perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada empunya. (menempatkan segala sesuatu pada tempatnya).

Kata Kunci: Kontekstualisasi; Poligami; *Qishash*; Teori Keadilan.

A. Pendahuluan

Teologi keadilan adalah wacana yang memperbincangkan tentang keadilan berdasarkan nalar agama. Teologi keadilan sebagai sebuah wacana akademik tidak pernah berhenti diperbincangkan dan bahkan senantiasa menjadi topik yang menarik perhatian di berbagai kalangan untuk dikaji dengan beragam sudut pandang. Dalam konteks nalar keadilan diletakkan beriringan dengan kepentingan manusia, maka teologi keadilan ini akan dipandang sebagai sebuah nilai kebenaran yang bersifat universal dan pada gilirannya akan diterima oleh seluruh kalangan manusia di jagad bumi ini.

Dalam kaitannya dengan perkembangan kajian akademik dan ilmu pengetahuan, nalar keadilan bisa ditelusuri dari berbagai peradaban manusia dengan masing-masing tokoh dan corak pemikirannya. Misalnya, di kalangan filosof semenjak Socrates, Plato dan Aristoteles cukup aktif mempercakapkan konsep dan cita ideal terkait dengan keadilan dalam relasinya dengan banyak segmen kehidupan, baik yang berhubungan dengan segmen Hukum, Negara, kebijakan publik dan lain sebagainya. Ketiga orang tersebut merupakan tokoh, pemikir dan filosof genius yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan pemikiran hukum dan keadilan. [1]

Dalam pandangan Aristoteles, keadilan itu terbagi "Keadilan Distributif" dan "Keadilan Korektif". Keadilan "Keadilan Distributif" (Memberi Bagian), yaitu keadilan yang mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum. Sedangkan "Keadilan Korektif" (Melakukan / Mengadakan Perbaikan) atau "Remedial" (Memberikan Pengobatan), yaitu suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan tanpa memandang siapa

[1] Tegu Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman* (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 59-62.

orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut ukuran objektif.[2]

Selain pandangan di atas, para ahli hukum murni menyebutkan bahwa keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir, keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal, agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.[3] Para ahli hukum membahas keadilan dalam kaitannya dengan norma hukum (*legal justice*), norma moral (*moral justice*), dan sosial (*social justice*).

Dalam hukum Islam konsep keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Artinya, keadilan melalui jalur hukum, harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi pedoman hukum Islam berupa al-Qur'an dan hadis, di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. [4]

Teologi keadilan dalam hukum Islam sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum. Bahkan keadilan dalam hukum Islam dijadikan persyaratan dalam menentukan benar atau salah, dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. [5] Sehingga dalam al-Qur'an meletakkan persoalan hukum senantiasa beriringan dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran harus dikembangkan dalam sikap, ucapan dan pengambilan keputusan. Kedua nilai ini harus diberlakukan untuk semua orang, sekalipun (untuk) musuh.

Al-Qur'an berbicara mengenai Keadilan dan kebenaran melalui beberapa

---

[2]M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 30. Lihat pula Tegu Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman,* h. 60-61.

[3]Tegu Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum:*…, h. 129.

[4]M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama:* …, h. 49.

[5]Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015), h. 27.

ayat al-Qur'an, antara lain:

- QS al-Baqarah/2:176 :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۧ

Terjemahnya :

> Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. [6]

- QS al-Nisā'/4:58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya :

> Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. [7]

- QS al-Nisā'/4: 135 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya :

> Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. [8]

- QS al-Mā'idah/5 : 8

---

[6]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an : Al-qur'an Tajwid Warna & Kode Angka, Transliterasi Perkata dan Terjemah* (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2020), h. 26.

[7]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an : …,* h. 87.

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an : …,* h. 100.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya :

> Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. [9]

Konsep dan cita ideal keadilan dalam hukum Islam, semuanya dapat dilihat dalam berbagai konstruksi hukum Islam yang mengatur hal ihwal relasi seorang manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan sesama manusia dan lingkungan yang menjadi locus dan episentrum aktivitas manusia.

Beberapa aspek hukum Islam yang memperhatikan dan mempertimbangkan teologi keadilan di antaranya adalah Hukum *Qishash* dan Hukum Poligami. Keduanya merupakan syariat Islam yang hadir untuk menyelesaikan problematika kehidupan umat manusia.

Eksistensi Hukum *qishash* adalah untuk menciptakan keadilan sosial dalam ranah kejahatan pidana, di mana kejahatan semacam pembunuhan harus ditindak-lanjuti dengan hukum yang telah diatur /ditetapkan dalam hukum Islam dengan harapan akan tercipta keadilannya yang berujung pada tatanan kehidupan yang jauh dari berbagai manifestasi kejahatan oleh sebab setiap kejahatan harus dibalas dengan setimpal.

Demikian juga Hukum Poligami hadir sebagai "solusi keadilan" dalam perspektif yang lain, bagi umat Islam jika sekiranya ada kecenderungan yang tak terkendali dan terkontrol atau memang dalam relasi suami istri ada persoalan urgent yang melahirkan pembicaraan dan kesepakatan untuk membuka ruang berlangsungnya poligami. Memang dalam kaitan dengan aspek hukum Islam ini banyak terjadi kesalah-pahaman di kalangan umat, setidaknya secara konseptual maupun praktis di lapangan. Pada titik kulminasinya, melahirkan tanya baru terkait dengan nalar keadilan di dalamnya. Sehingga ada upaya untuk kembali

[9]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy …,* h. 108

melakukan kontekstualisasi ulang terhadap kedua aspek hukum ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang hakikat fikih keadilan dalam hukum Islam, kontekstualisasi fikih keadilan pada masalah *qishash* dan kontekstualisasi fikih keadilan pada masalah poligami.

B. Pembahasan

1. Hakikat Fikih Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan adalah kata jadian dari ”Adil” yang berasal dari bahasa Arab عدل yang berarti ‘sama’.[10] Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal- hal yang bersifat immaterial. Kata *‘adl* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *‘adala – ya’dilu – ‘adlān – ‘udūlān – wa ‘adālatan* (– عدوال – عدال – يعدل – عدالة وعدل). Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf *‘ain, dal,* dan *lam,* yang makna pokoknya adalah *al-istiwa’* dan *al-i’waj.* Rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni ‘lurus’ atau ‘sama’ dan ‘bengkok’ atau ‘berbeda’. Dari makna pertama, kata ‘*adl* berarti ‘menetapkan hukum dengan benar’. Seorang yang *‘adl* berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. [11]

Kata adil dalam berbagai derivasinya dalam al-Qur’an terulang kurang lebih dua puluh delapan (28) kali. *Pertama,* adil dalam arti ‘sama’ atau tidak memihak serta tidak berat sebelah. Makna ini diungkapkan beberapa ayat, di antaranya dalam QS al-Nisa’/4: 58. Selanjutnya dalam QS an-Nisa’/4:135, frase keadilan bermakna dengan frase *al-qisṭ* yang berarti ‘kewajaran’, ‘keadilan’, ‘pembagian yang adil’. *Kedua,* adil dalam arti “seimbang”. Keadilan yang dimaksudkan adalah kesesuaian. Dalam arti bahwa kesesuaian dan keseimbangan dalam lingkaran perbedaan, tidak mengharuskan persamaan kadar yang besar dan kecilnya, akan tetapi lebih ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Pengertian frase keadilan ini terdapat dalam QS al-Infitar/82:6-7.

Ketiga, frase keadilan yang dinisbatkan kepada Allah swt. yang berkonotasi memelihara kewajiban atau berlanjutnya eksistensi. Dalam hal ini

[10]Abi al-Ḥusa’in Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu’jam Muqāyis fi al-Lugah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), h. 745

[11]Muchlis M. Hanafi, dkk., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur’an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur’an, 2010), h. 2-3.

Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu apapun disisi-Nya. Pengertian ini dipahami dari pandangan bahwa Allah sebagai *qaiman bi al-qist* (yang menegakkan keadilan). Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS Fushshilat/41:46. *Keempat,* perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini disebutkan dalam QS al-An'am/6:152. Dalam perkembangan selanjutnya istilah ini didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*the righ man on the right place*) atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. [12]

Teologi keadilan merupakan ideal moral yang diajarkan al-Qur'an. Tuhan memerintahkan agar manusia bersikap adil di antara sesama, dalam mengadili di antara manusia hendaknya mengadili dengan adil (Q.S al-A'rāf/7:29; Q.S al-Naḥl/16:90; Q.S al-Syu'arā'/26:15, dan Q.S al-Nisā'/4:58).

Bagi sebagian muslim, mempertahankan keadilan merupakan sebuah keharusan, meski terkadang hal itu merugikan bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga, sahabat dan sanak famili, tanpa membedakan kaya miskin atau apapun strata sosial manusia. Wahyu itu sendiri merupakan pengejawantahan dari kebenaran dan keadilan yang diturunkan bersama *mizan* atau keseimbangan (yang benar dan yang salah), oleh karena itu manusia harus menegakkan keadilan sebagaimana manusia menegakkan kebenaran. Keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat, karena itu orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan (QS al-Mā'idah/5:3), atau membuat diri mereka menyeleweng dari ideal keadilan, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran (QS al-Mā'idah/5:9). [13]

Prinsip keadilan tersebut mencakup berbagai aspek hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat dan negara. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa term keadilan pada umumnya berkonotasi pada penetapan hukum atau kebijakan penguasa. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan,

[12]Muchlis M. Hanafi, dkk, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia:* …, h. 5.

[13] M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama:* …, h. 50-51.

khususnya di bidang hukum dan peradilan. [14]

Dari beberapa konsep keadilan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang mengatur *aḥkam al-ibādah* dan *aḥkam mu'āmalah* adalah manifestasi dan sekaligus merefleksikan konsep keadilan hukum Islam, di mana keadilan adalah keseimbangan dan harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis.

2. Kontekstualisasi Fikih Keadilan dalam Hukum *Qishash*

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini, keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang, dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. [15]

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil, kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah, adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, baik secara anologis, ketidak-adilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidak-adilan yang lebih besar. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. [16]

Islam hadir dalam salah satu aspeknya (hukum) adalah untuk mengantisipasi segala perbuatan/ tindakan manusia yang mengarah pada pengrusakan (*alfasad*), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka harus

[14] Juhaja S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1 ; Bandung : LPPM Universitas Islam, 1995), h.72

[15] John Rawls, *A Theory of Justice,* yang diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Cet. I ; Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4

[16] John Rawls, *A Theory of Justice*…, h. 3-4

diberlakukan hukum berdasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah dalam *nash*, karena penerapan hukum Islam akan memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam Islam terdapat seperangkat aturan-aturan dan norma-norma kepidanaan yang harus dilaksanakan agar tercapai kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan serta menerangkan tanda-tanda atau jalan yang harus dilalui.

Secara *kasyaf* mata lahiriyah, mensyari'atkan hukuman dengan memberikan balasan setimpal seperti pembunuh akan dibunuh, memecahkan kepala orang lain dengan memecahkan kepala bagi pelaku dan seterusnya, merupakan hukuman yang sangat kejam. Tetapi justeru dengan jalan itulah akan menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum, kerena akan memunculkan trauma bagi orang yang akan melakukan perbuatan tersebut. Fenomena lebih konkrit dapat dilihat ternyata di beberapa Negara, terdapat orang-orang yang tidak puas dengan sanksi (*uqubat*) hukum yang diberikan sehingga muncul sikap tidak percaya pada aparat hukum dan materi hukum, akhirnya kadang terjadi eksekusi dengan langkah melakukan sendiri tanpa melalui jalur-jalur hukum.

Kemudian jika alasan menghilangkan nyawa hanya semata-mata milik Allah, sebenarnya dalam hukum pidana Islam, pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas seperti aksi massa yang dilakukan di beberapa tempat terhadap pelaku pencuri. Eksekusi tetap ada pada pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari Allah sebagai khalifah di dunia, dan eksekusi mati dilakukan berdasarkan aturan syar'i dan bukan satu-satunya bentuk eksekusi dalam *qishash,* tetapi bagi yang mendapat ampunan dari pihak keluarga, hanya akan dikenakan denda (*diyat*).

Dalam perspektif tersebut dapat dikatakan bahwa hukum *qishash* dalam konstruksi hukum Islam mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi korban sebuah kejahatan. Hal ini sejalan juga dengan logika akal sehat bahwa kejahatan memang harus dibalas dengan kejahatan pula sebagai bentuk "sanksi" yang dimaksudkan memberikan efek jerah bagi pelaku

kejahatan dan lainnya agar tidak ada lagi kejahatan yang serupa dilakukan dalam waktu dan konteks yang berbeda.

Gigi dibalas dengan gigi dalam konstruksi hukum *qishash* adalah bentuk manifestasi keadilan. Jika tidak ingin adanya sanksi semacam itu, maka tidak boleh melakukan kejahatan fisik kepada siapa pun. Artinya, jika berani melakukan kejahatan kepada orang lain, maka harus berani juga untuk menerima konsekuensinya. Itulah logika keadilan bekerja dalam hukum *qishash*. Keadilan berlaku untuk semua pihak. Dari kejahatan demi kejahatan serupa tidak seenaknya orang akan melakukannya.

Logika demikian mudah ditemukan dalam konsep dan cita ideal hukum *qishash* dalam hukum Islam. Secara sederhana kisas atau qisas (Arab: قصاص, *qishash*) adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah "utang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum *qishash* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. *Qishash* berasal dari bahasa Arab dari kata صا ص yang berarti mencari jejak seperti *al-Qashâsh*, sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Sedangkan Syekh Shâlih bin Fauzân mendefinisikannya dengan: *'al-Qishâsh* adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi.[17]

Hukum *qishash* disyariatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, diantara dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2:178

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang

[17] John Rawls, *A Theory of Justice,* , h. 11

merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. [18]

Q.S al-Baqarah/2:179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰـاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa[19]

Sedangkan dalil dari Sunnah di antaranya adalah hadits Abu Hurairah ra., Rasulullâh saw. bersabda:

الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلا أَنْ يَعْفُوَ وَلِى الْمَقْتُولِ

Artinya:

"(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah *qishash*, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan."

Selain itu, hadis Rasulullah saw:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَظرَيْنِ: إِمّا أَنْ يَفْتَدِىَ وَإِمّا أَنْ يَقْتُلَ

Artinya:

"Siapa yang miliknya (diri atau keluarganya) dibunuh, maka dia (boleh memilih) antara dua pilihan: Mengambil ganti rugi (*diyat*), atau membunuh (*qishash*)."

Dalam satu riwayat dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ra., "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ -وَالخَبَلُ الجَرَاحُ- فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمّا أَنْ يَقْتَصّ أَوْ يَأْخُذَ العَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ[20]

Artinya:

"Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-*qishshash*, mengambil ganti rugi (*diyat*), atau memaafkan (tanpa membayar *diyat*), dan jika dia

[18]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an :…,* h. 27.

[19]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an :* …, h. 27.

[20] Hadis Riwayat at-Tirmidzi Nomor : 1409

> memilih pilihan keempat (lebih dari *qishash* atau *diyat*) maka ambillah tangannya (laranglah)."

Tentu keberadaan hukum *qishash* yang disyariatkan oleh Allah swt. memiliki hikmah yang agung. Hikmah-hikmah tersebut ada yang diketahui manusia dan ada yang hanya menjadi rahasia Allah swt.

Beberapa hikmah *qishash* dalam hukum Islam, di antaranya : ***Pertama ;*** menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Artinya, *qishash* disyariatkan dalam Islam untuk menjaga terjadinya pertumpahan darah diantara sesama manusia sekaligus menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai hamba Allah. Oleh karena itu Allah memberikan gambaran dengan Firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah/2:179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Terjemahnya:

> Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa[21]

Hikmah *Kedua* dari syariat *qishash* adalah untuk mewujudkan keadilan dan menolong yang terzhalimi dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas pelaku seperti yang dilakukannya kepada korban. Hikmah kedua ini disyariatkan oleh Allah swt dalam Q. S al- Isra / 17 : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

Terjemahnya :

> Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. [22]

Hikmah *Ketiga* syariat *qishash* adalah sebagai sarana taubat dan pensucian dari dosa yang telah dilanggarnya, karena *qishash* menjadi *kaffârah* (penghapus) dosa pelakunya. Hal ini dijelaskan Rasulullah saw. dalam

[21]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an :* …, h. 27.

[22]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an :* …, h. 285.

sabdanya :

> "Kalian harus berbai'at kepadaku untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri dan tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak melakukan kedustaan dan berbuat durhaka dalam hal yang ma`ruf. Barangsiapa di antara kalian menunaikannya maka pahalanya ada pada Allah dan siapa yang melanggar sebagiannya lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai penghapus baginya dan siapa yang melanggarnya lalu Allah tutupi; maka urusannya diserahkan kepada Allah. Bila Ia kehendaki maka mengadzabnya dan bila Ia menghendaki maka mengampuninya'. (H. R : Muttafaq 'alaihi).

Hikmah *Ketiga* ini bertujuan untuk membangun kesadaran manusia akan kekejian yang dilakukan kepada sesama manusia, sehingga syariat Islam mengajarkan kepada pertaubatan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan adalah sesuatu yang keji dan mendatangkan penderitaan pada diri sendiri dan orang lain. Hikmah ini sekaligus sebagai model antisipasi atau pencegahan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, dengan mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Meskipun demikian, konsep dan cita ideal hukum *qishash* memiliki ruang kontekstualisasi sehingga memungkinkan diterapkan sanksi hukum dalam bentuk yang lain. Dalam konstruksi hukum Pidana Islam (*Fiqh al- Jinayah*) juga terdapat hierarki hukum yang berhubungan dengan *jinayat* (kejahatan) yang dilakukan oleh seorang manusia *mukallaf*, yaitu hukum *diyat*. Olehnya, hukum *qishash* terhadap *jinayat* adalah salah satu dari sanksi hukum yang ditetapkan dan diterapkan dalam hukum Islam. Masih ada aspek sanksi hukum lainnya atas kejahatan. Intinya, nilai keadilan dapat terwujud dalam kehidupan dengan adanya model dan hierarki sanksi demikian.

Dalam konteks ini, sesungguhnya dalam hukum Islam masih terdapat ruang kontekstualisasi terkait dengan penerapan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia misalnya, kontekstualisasi penerapan hukum *qishash* dalam bentuk dan wujud yang lain, seperti penjara dan lainnya. Secara substansi, model hukuman dengan penjara dimaksudkan untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bagi pihak-pihak yang dizhalimi atau teraniaya. Hal yang merupakan

bagian fitrah manusia adalah hasrat untuk membalas ketika hak-haknya dilanggar atau dirampas dengan perlakuan yang setimpal. Hal ini didapati pada diri setiap manusia tanpa membedakan waktu, tempat, suku bangsa dan ras. [23]

3. Kontekstualisasi Nalar Fikih Keadilan dalam Hukum Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Polygamie*. *Poly* berarti banyak dan *Gamos* berarti kawin. Maksudnya, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. [24]

Poligami telah terjadi di kalangan masyarakat sejak jaman dahulu. Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa nabi Ibrahim telah melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah dan Siti Hajar. Apabila kita membaca beberapa kitab suci baik al-Qur'an, Taurat, Perjanjian Lama, Zabur maupun agama Hindu, banyak kita jumpai keterangan tentang poligami. [25]

Konsep tentang poligami lebih banyak membahas dan mengkaitkan dengan hukum perkawinan Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan poligami yang berkembang saat ini dan yang dikenal oleh masyarakat tentang poligami adalah berdasarkan pemahaman ajaran Islam. Dengan demikian, konsep poligami perlu dikaji dan dianalisis secara mendalam mengapa Islam membolehkan poligami dalam suatu perkawinan serta bagaimana konsep keadilan menurut Islam dalam melakukan poligami.

Perkawinan poligami dikenal dalam ajaran agama Islam berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'/ 4 : 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Terjemahnya :

[23] https://almanhaj.or.id/3121-fikih-qishash.html. Diakses pada tanggal : 8 April 2022 Pukul 17. 30 wita

[24] https://kbbi.web.id/poligami, diakses pada 08 April 2022

[25] Bibit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Cet. 1 ; Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 110.

> Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.[26]

Ketentuan poligami yang ditetapkan Allah bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sementara penerapan hukum alam oleh manusia di muka bumi ini merupakan hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam berdiri di atas dua asas, yang disebut *Principia Prima* dan *Principia Secundaria*. *Principia Prima* adalah prinsip yang berkaitan dengan hak dasar manusia yang bersifat umum, universal dan berlaku tanpa batas ruang dan waktu. Prinsip ini bersifat mutlak dan melekat pada setiap manusia. *Principia Secundaria* adalah prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dari *Principia Prima*.

Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Perlu ditegaskan kembali, disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sini harus disadari bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan maka ia dilarang berpoligami. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Qur'an (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. [27]

Konsep poligami dengan syarat yang ketat dapat dipahami bahwa menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lainnya, merupakan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahkan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan secara

[26]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Asy-Syifa The Holy Qur'an* :…, h. 77.

[27] http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/557/60, diakses pada 08 April 2022

seimbang.[28]

Allah swt. memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat, karena Allah swt. mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Termasuk dalam hal ini, sikap "adil" dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang diperintahkan di dalam al-Qur'an adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian waktu dan memberikan nafkah. Namun, tentang keadilan dalam hal mencintai dan menyayangi menurutnya termasuk keadilan yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya yang berada di luar kemampuan manusia.

Adapun sebab timbulnya kesalah-pahaman dalam masalah ini, di antaranya adalah karena hawa nafsu dan ketidak-pahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa' (4): 129. Dari ayat ini, al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri, sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.[21] Sedangkan al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, al- Syaukani menegaskan, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami.[29]

Menurut ahli tafsir al-Maraghi, bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-

[28] Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469.

[29]Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, *Nailul Author* (Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655), h. 3

benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fikih "menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat". Ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. [30]

Imam asy-Syafi'i berkata, "Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah Ta'ala Q.S al-Nisa': 129): "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)...", (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt. mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. "...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)" artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat). [31]

Imam al-Qurthubi berkata, "Dalam ayat ini Allah memberitakan ketidak-mampuan manusia untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu menyamakan dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati. Dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan manusia. Bahwa mereka berdasarkan asal penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Allah melarang terlalu cenderung kepada yang dicintai.

Sayyid Qutub di dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur`an* memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhshah* (keringanan). Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja. [32]

Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak

[30] Harun,"Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", h. 18

[31] Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2* (Cet. 1 ; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 275

[32] Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an,* h. 278

diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. An Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami, tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami. [33]

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, misal adil dalam pembagian hari giliran, tempat tinggal, biaya hidup dan pakaian. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah swt. menjanjikan dalam Q.S al-Baqarah ayat 286 bahwa "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Namun, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan *prestise* di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemashlahatan dalam hukum Islam, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

C. Penutup

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, maka konsep tentang teologi keadilan dalam *qishash* dan Poligami berdasarkan paradigma hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Keadilan bernilai mutlak dan secara moral mengikat, oleh karena itu orang-orang beriman diperingatkan agar tidak membiarkan kebencian terhadap seseorang menyebabkan mereka melanggar batas-batas keadilan, atau membuat

[33] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Cet. 1 ; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 124.

diri mereka menyeleweng dari ideal keadilan, karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan dan kebenaran. Term keadilan dalam hukum Islam dimaknai dengan beberapa maksud, yaitu: adil dalam arti 'sama' atau tidak memihak serta tidak berat sebelah, keadilan juga dimaksudkan adalah kesesuaian dan keseimbangan dalam artian bahwa kesesuaian dan keseimbangan dalam lingkaran perbedaan. Selain itu, keadilan juga dimaknai dengan perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya (menempatkan segala sesuatu pada tempatnya).

Kedua, Konsep hukuman *qishash* merupakan hukuman yang sangat kejam. Tetapi justeru dengan jalan itulah akan menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum, kerena akan mermunculkan trauma bagi orang yang akan melakukan perbuatan tersebut. konsep dan cita ideal hukum *qishash* memiliki ruang kontekstualisasi sehingga memungkinkan diterapkan sanksi hukum dalam bentuk yang lain. Dalam konstruksi hukum Pidana Islam (*Fiqh al- Jinayah*) juga terdapat hierarki hukum yang berhubungan dengan *jinayat* (kejahatan) yang dilakukan oleh seorang manusia mukallaf, yaitu hukum *diyat*. Olehnya, hukum *qishash* terhadap *jinayat* adalah salah satu dari sanksi hukum yang ditetapkan dan diterapkan dalam hukum Islam.

Ketiga, Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang), tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

D. *Implikasi*

Berdasarkan kajian demikian, terlihat betapa judul kajian terkait dengan persoalan ini perlu ditingkatkan dengan berbagai macam pendekatan keilmuan guna memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abi al-Ḥusa'in Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu'jam Muqāyis fī al-Lugah.* Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Ali, M. Daud. 1994. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya.* dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Anton-Hermann Chroust," The Philosophy of Law of Gustav Radbruch" The Philosophical Review, Vol. 53, No. 1 (Januari, 1944).

Azizy, A. Qodry. 1982. *Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di Indonesia*, Diktat, Semarang : Fakultas Syariah lAIN Walisongo.

Dahlan, Abdul Azis et al. (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 .Cet. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Effendy. Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina.

Hartono, Sunaryati. 1998. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung.

Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, *Nailul Author*. Libanon: Darul Kitab Ilmiyah, 1655.

John Finch, *Introduction to Legal Theory*. London: Sweet & Maxwell, 1974. Juhaja S. Praja, *Filsafat Hukum Islam.* Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995. Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*.

Mustafa, M. (2019). POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I. *Al-Bayyinah, 3*(2), 190-203.

Muchlis M. Hanafi, dkk., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur'an Tematik.* Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur'an, 2010.

Muḥammad ibn Mukrim ibn 'Alī Abu al-Faḍl Jāmal al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisan al-'Arab,* vol. IV. t.t: Dar al-Ma'arif, 1979.

Quraish, M. Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.* Cet. XXV. Bandung: Mizan. 2003.

Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i.* Malang: Kelompok Lintas Publishing, 2015.

Ricklefs, MC. 1982. *Islamisasi di Jawa : Abad ke - 14 hingga ke- 18"*, dalam Tika Noorjaya dan Endang Basri Ananda, *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta, LP3ES.

Rifyal Ka'bah, *Politik & Hukum dalam al-Qur'an.* Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, 2005.

Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an,Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sjadzali, Munawir. 1994. *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agarna di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia*: *Pemikiran dan Praktek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam,* Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.

Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional,* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Tegu Presetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman.* Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.